ISSN 1979 - 7648

9 771979 764002

OTONOMI

JURNAL ILMU ADMINSTRASI

ISSN : 1979 - 7648

STIA TRINITAS -AMBON

OTONOMI Vol. 10. No. 20, Agustus 2017

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) DI DESA HARAPAN KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

Oleh
Monica Feronica Bormasa

Abstract

The purpose of this study is to analyze how the form of community participation in PNPM-MP in the field and the problems and obstacles that arise in the implementation. Qualitative research method using descriptive approach. The research was conducted in Harapan Village, Malili District, East Luwu Regency, South Sulawesi Province.

The results showed that community participation in the PNPM-MP both at the stage of socialization and planning and implementation and supervision stage is quite good. The program also brought positive changes in terms of environment, human development, and community empowerment. However, some people are more concerned with personal interests than group interests. That is, not all communities participate with the goals of group welfare but because of wages or rewards. In addition, the distrust of the community towards cadres or perpetrators of activities in rural areas. This happens because only a small percentage of the information is conveyed through information boards, which constitute the information center and transparency of the implementation of activities.

Keywords: Community Empowerment, PNPM Mandiri Pedesaan, Community Participation.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di lapangan dan masalah serta hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP baik pada tahap sosialisasi dan perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan pengawasannya cukup baik. Program ini juga membawa perubahan yang positif baik dari segi lingkungan, pembangunan manusia, dan perihal pemberdayaan masyarakat. Namun, ada sebagian masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kelompok. Artinya, tidak semua masyarakat berpartisipasi dengan tujuan kesejahteraan kelompok melainkan karena upah atau imbalan. Disamping itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kader atau pelaku kegiatan di Pedesaan. Hal ini terjadi karena hanya sebagian kecil yang memperhatikan informasi yang disampaikan melalui papan informasi, yang merupakan sebagai pusat informasi dan transparansi pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Pedesaan, Partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan. Persoalan kemiskinan ini yang telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak mengenyam pendidikan, dan kesehatan. Kurangnya perhatian kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena lapangan pekerjaan semakin minim dan pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan secara terbatas.

Kemiskinan jika tidak ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat. Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan terbesar dalam upaya Pembangunan,

Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Adi Hosan (2009) bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan.

Senada dengan pendapat di atas kemiskinan ditimbulkan ketidakadilan faktor produksi, kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.

Kemiskinan menurut pandangan (UNDP dalam Cahyat 2004) adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan hidup antara lain, memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, kemiskinan merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa dan Negara serta kerja keras yang terorganisasi mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Keterlibatan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah strategis karena diperlukan suatu kebijakan yang dapat melahirkan program pembangunan terpadu antar pertumbuhan,

termasuk upaya peningkatan peran pemerintah menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perwujudan yaitu dengan membentuk program pedesaan dengan pembangunan fasilitas atau infrastruktur.

Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta diantara pihak tidak saling menyalahkan agar kesejahteraan tercapai. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro.
4. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan adil dan makmur, Sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian

nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan”.

Dipertegas pada Pasal 34 Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat (Amandemen IV), kesejahteraan merupakan platform perekonomian dan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Indonesia menganut kesejahteraan (*welfare state*) dengan model Negara Kesejahteraan Partisipatif (*participatory welfare*) yang dalam literature pekerjaan sosial dikenal dengan dengan *Pluralisme*, kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa Negara mengambil bagian penanggulangan masalah sosial penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan, pemecahan masalah kemiskinan juga mulai luntur. Pelaksanaan PNPM Pedesaan yang berdasar pada indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target tersebut.

Kerangka Pikir

Implementasi program nasional dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan PNPM di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut adalah penelitian yang datanya kualitatif. Penelitian tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Secara teoritis penelitian kualitatif dianggap dapat melakukan pengamatan melalui lensa-

lensa lebar dan mencari pola-pola hubungan antara konsep yang sebelumnya tidak ditentukan.

Objek penelitian di Desa Harapan merupakan salah satu desa dari tiga belas desa yang ada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data yang digunakan, Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi

Analisis data mengikuti langkah analisis dari Miles dan Huberman sebagai berikut :

Gambar 2 Langkah Analisis Miles dan Huberman

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan langkah akhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dipikiran suatu temuan tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Operasional Variabel

1. Implementasi kebijakan PNPM Pedesaan
Definisi konseptual ini diturunkan menjadi empat dimensi kajian : indikator-indikator:
 - b. Sosialisasi tujuan Kebijakan
 - c. Manfaat Kebijakan
 - d. Dukungan Aparatur
 - e. Dukungan anggaran
 - f. Dukungan fasilitas Kebijakan.
2. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah tersirat dalam lingkup dan obyek

pemberdayaan mencakup beberapa indikator yaitu:

- a. Peningkatan kepemilikan aset serta kemampuan (secara individual dan kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan.
 - b. Hubungan antar individu dan kelompoknya.
 - c. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan.
 - d. Pengembangan jejaring dan kemitraankerja, baik di tingkat lokal, regional, maupun global.
3. Penanggulangan Kemiskinan
Pada dasarnya ruang lingkup kegiatan program PNPM pedesaan terbuka bagi semua kegiatan memiliki indikator-indikator penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat yang meliputi :
 - a. Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi.
 - b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, perhatian dalam memanfaatkan dana bergulir ini.
 - c. Kegiatan yang berkaitan peningkatan sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian kesejahteraan RTM.

- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan usaha, manajemen.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemberdayaan Nasional Masyarakat Pedesaan Di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Dari hasil penelitian pada kegiatan bidang sosial merupakan salah satu kegiatan dari Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang mencakup pada bidang-bidang sosial antara lain kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di bidang Sosial secara umum terdapat beberapa tujuan dari kegiatan ini yaitu memperkuat ikatan sosial dengan menggalang kepedulian dan solidaritas, kebersamaan dan menumbuhkan kepercayaan dengan menggerakkan kapasitas sosial dimasyarakat, meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi pengeluaran masyarakat miskin serta menumbuhkan kebiasaan untuk mengelola program sosial yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi kegiatan.

Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur di bidang

sosial memprioritaskan dan memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Harapan Kabupaten Luwu Timur.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dari hasil penelitian kegiatan di bidang Ekonomi adalah salah satu bentuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) terdiri dari pengelolaan dana pinjaman bergulir. Dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam kegiatan dibidang ekonomi ini lebih terfokus pada upaya peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat, memberikan tambahan keterampilan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang terampil.

Kesimpulan

1. PNPM Mandiri dilakukan untuk dua bidang kesejahteraan melalui bidang social dan ekonomi.
2. Bidang sosial meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya yang bertujuan memperkuat ikatan sosial dengan menggalang kepedulian dan solidaritas, kebersamaan dan menumbuhkan kepercayaan dengan menggerakkan kapasitas sosial dimasyarakat, meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi pengeluaran masyarakat miskin serta menumbuhkan kebiasaan untuk mengelola program sosial yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi kegiatan.
3. Bidang Ekonomi terdiri dari pengelolaan dana pinjaman bergulir. Dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam
4. kegiatan bidang ekonomi terfokus pada upaya peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat, memberikan tambahan keterampilan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang terampil.

Saran

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM Mandiri

Pedesaan diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran program.

2. Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebih aktif lagi dan sebaiknya tetap di lokasi kegiatan dalam tahun berjalannya kegiatan. Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali dan mendekati masyarakat. Di samping fasilitator PNPM sebaiknya juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah.
3. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada komponen lingkungan sebaiknya lebih banyak yang dikerjakan secara kerja bakti/gotong royong sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap prasarana dan sarana yang dibangun.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan kegiatan komponen ekonomi dan sosial.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2005. *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Graha Ilmu. Jakarta
- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Cahyat A. 2004, *Bagaimana Kemiskinan di ukur? Beberapa model perhitungan kemiskinan di Indonesia*, Provert & Decentralization Project CIFOR-BMZ.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
- Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Penerbit. Tarsito.
- Suharto, Edi, 2005, *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*, makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Buku Pentunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Edisi Mei 2010.
- Kepmen Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 / Kep / Menko / Kesra / VII/2007 *Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Tahun 2007